

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. penelitian terdahulu

Penelitian tentang akuntansi sosial dalam Islam pernah dilakukan oleh T.E.Gambling dan R.A.A. Karim, dalam Harahap dari *journal of business finance & Accounting* (1997:188) pada penelitian ini dijelaskan pada akuntansi sosial yang didasarkan pada hukum Islam, hasilnya dapat disimpulkan bahwa seorang muslim atau kelompok masyarakat muslim mempunyai aturan sesuai dengan kebudayaan Islam, sehingga teorinya pun adalah Islam dan akan sesuai dengan hukum syari`ah. Penelitian ini tentang akuntansi sosial yang didasarkan pada hukum Islam dan yang membedakan dengan peneliti ini adalah batasan penelitian ini lebih luas.

Triyuwono (2000) dalam Syaiful dan Suwarjono (2004) menyatakan bahwa akuntansi syari`ah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen kepada pemilik perusahaan. Implikasi yang muncul dengan adanya perintah pertanggungjawaban, maka dalam melakukan praktik akuntansi harus didasarkan pada aturan-aturan dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur`an surat Al-Baqoroh ayat 282, yang didalamnya terkandung konsep dan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Ketiga tiga prinsip tersebut dapat dijadikan alat untuk menyakinkan *stockholders* bahwa manajemen keuangan masjid profesional dan amanah. Dalam penelitian ini mengenai akuntansi syari`ah dan akuntabilitasnya kepada para dermawan dan yang

membedakan dengan peneliti ini adalah penelitian ini lebih menekankan pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi syaria`h.

Penelitian mengenai penerapan PSAK no. 45 terhadap evaluasi kinerja manajer pernah dilakukan oleh Kumayanti (2000) dengan studi kasus pada perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah jawa timur. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK no 45 pada PKBI daerah Jawa Timur memperbaiki evaluasi kinerja manejer karena dengan suatu standar pelaporan, laporan keuangan PKBI menjadi mudah dipahami, memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi. Dalam penelitian ini mengenai penerapan pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan yang membedakan dengan peneliti ini adalah obyek penelitian ini pada PKBI

Peneliti Hasan Supriadi dengan judul skripsi ”peranan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana pada Yayasan ALASKO di Surabaya” mamfokuskan pada bagaimana suatu laporan keuangan dapat berfungsi tidak sekedar hanya sebagai catatan namun dapat memberi informasi mengenai keefektifan dalam pengelolaan dana pada suatu organisasi nirlaba. Peneliti dalam analisisnya berusaha menerapkan adanya akuntansi anggaran dengan rekomendasi penyusunan laporan pembanding antara anggaran dan realisasi dalam menilai keefektifan pengelolaan dana. Dengan catatan penelitian ini belum adanya aturan IAI yang mendasari tentang pelaporan keuangan nirlaba. Penelitian ini mengenai organisasi nirlaba untuk memberi informasi mengenai keefektifan dalam pengelolaan dana dan yang membedakan dengan peneliti ini penelitian ini adalah

hanya memfokuskan pada pembandingan antara anggaran dan realisasi pengelolaan dana.

2.2. Landasan Teori

Lahirnya akuntansi syari`ah yang merupakan paradigma baru dalam wacana akuntansi (Triyuwono: 2000) sangat tertarik dengan obyek yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat umum. Kondisi tersebut meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran. Di Indonesia, istilah akuntansi syari`ah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika harian *Republika* mengekspos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syari`ah. Sejak itu akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia.

Pada tahap awal, istilah akuntansi syari`ah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syari`ah pada tingkat wacana (*discourse*). Dan ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syari`ah merupakan sebuah wacana-wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang akuntansi syari`ah itu sendiri. Wacana tersebut bisa seterusnya berada pada tatanan konsep, tetapi juga dapat diturunkan ketatanan yang lebih praktis. Pertama cenderung untuk mengembangkan akuntansi syari`ah sebagai kajian filosofis – teoritis yang memberi payung untuk definisi konkrit dalam bentuk praktis. Sedangkan yang kedua lebih menekankan bentuk praktik dan kebutuhan pragmatis.

2.2.1. Akuntansi Syari`ah Filosofis-Teoritis

Kajian pada tingkat filosofis - teoritis di Indonesia bisa dirujuk terutama pada karya Triyuwono (1996; 1997; 2000) dan Harahap(1992; 1997). Sedang di dunia Internasional kita bisa merujuk pada karya Gambling dan Karim (1995; 1999), Triyuwono dan Gaffikin (1996). Pada tingkat filosofis – teoritis ini wacana difokuskan pada metode bagaimana kita bisa membangun dan mengembangkan akuntansi syari`ah itu sendiri (lihat Triyuwono 1996; 1997; 2000 Tarahap 1992;1997) dan di teruskan dengan teorinya (Tarahap1992; 1997; Baydoun dan Willet 1994; Hamid dkk 1993) dalam Cahyono, Kholis, Satriawan (2002). Secara umum, Wacana ini mulai dari penetapan tujuan akuntansi, kemudian teori dan akhirnya ke teknik akuntansi. Dan pada tingkat filosofis - teoritis ini para penulis jarang atau sama sekali tidak membicarakan konsep-konsep praktis yang bisa langsung dipraktikkan di dunia nyata. Kajian pada tingkat ini sangat berharga untuk memperkaya akuntansi syari`ah sebagai ilmu pengetahuan dan sangat berguna untuk merumuskan taknik akuntansi yang akan dipraktikkan dalam dunia nyata.

2.2.2. Akuntansi Syari`ah

Kalau dicermati dalam surat Al-Boqorah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan mu`amalah. Dari penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan disini, diantaranya:

Littleton mendefinisikan, tujuan utama akuntansi adalah untuk melakukan perhitungan priodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini

merupakan inti teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan rujukan dalam mempelajari akuntansi.

APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No. 4 mendefinisikan sebagai berikut “ akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai badan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Pengertian diatas sengaja tidak disampaikan definisi akuntansi syari`ah, karena yang terpenting adalah, apakah dalam proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur`an (Muhammad,1996. Hal,10)

Akuntansi syari`ah praktis adalah akuntansi (syari`ah) yang sudah dipraktikkan di dunia nyata. Di Indonesia dan dunia Internasional, akuntansi syari`ah hanya dilembaga keuangan syari`ah, yaitu bank syari`ah. Di indonesia barang kali hanya karya widodo dkk (1999) yang bisa kita anggap sebagai karya kongkrit dan praktis tentang akuntansi syari`ah widodo dkk (1999) dalam Cahyono, Kholis, Satriawan (2002) secara khusus menulis dan merumuskan konsep-konsep teknis akuntansi untuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) karya ini

sangat bagus, karena penyajiannya sangat konkrit dan langsung dapat dipraktikkan. Karya yang satu-satunya memberikan pedoman dipraktik akuntansi yang dilakukan oleh BMT. Sementara pedoman atau standar akuntansi untuk bank syari`ah sampai saat ini belum dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

IAI dengan Bank Indonesia (BI) saat ini sudah membuat draft standar akuntansi keuangan bank syari`ah. Standar yang di buat ini merujuk pada *accounting and auditing standars for islamic financial institutions* (AAOIFI) pada tahun. Langkah ini sangat positif karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan teknis dari bank-bank syari`ah yang jumlahnya banyak pada akhir-akhir ini.

2.2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekwensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (agent) dengan pricipal (pemilik) principal dalam hal ini memberikan wewenang penuh pada agent untuk melakukan aktivitas organisasi. Sebagai konsekwensi atas wewenang ini, maka agent harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya pada pricipal. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, penetapan mekanisme pemeriksaan sangat penting dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh agent benar-benar dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Masjid dilakukan secara profesional dan pada gilirannya akan mempunyai dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keuangan masjid (Cahyono, Kholis, Satriawan, 2002).

Berdasarkan uraian di atas bahwa akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis dari wewenang yang diperoleh agent dan harus bertanggungjawab terhadap principalnya, yaitu pemberi amanah.

Principal melepaskan kontrol atas sumber daya pada agent, memberikan instruksi atau ekspektasi atas tantangan penggunaan sumber daya. Kemudian agent bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian tersebut. Agent dan principal relationship dalam kajian ini (yaitu: dalam konteks manajemen keuangan masjid) lebih luas dengan pengertian di atas. Keluasan ini terletak pada pengertian principal atau siapa sebetulnya principal dalam organisasi nirlaba ini. Dalam pengertian umum seperti di atas, principal adalah pemegang saham (*stockholders*). Sedangkan principal dalam konteks pengelolaan keuangan masjid adalah pemberi amanah (umat Islam) dan Tuhan. Ini berarti bahwa manajemen (agent) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya pada kedua pihak tersebut di atas.

2.2.4. Karakteristik Organisasi Nirlaba.

Anthony dan Young (1998,49) dalam Cahyono, Kholis, Satriawan (2002) mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai "organisasi yang tujuannya adalah sesuatu diluar menerima keuntungan untuk para pemiliknya. Biasanya tujuannya adalah memberi pelayanan." Ini jelas berbeda dengan organisasi yang mencari keuntungan dan berjuang untuk mendapatkan keuntungan dan para pemiliknya (pemegang saham) yang memberi modal ekuitas akan selalu berharap untuk mendapatkan deviden sebagai pengembalian modal mereka. Dalam praktik pertanggungjawaban keuangan, ada hubungan yang sangat jelas dan formal antara

pemilik principal, di satu pihak, dan manajemen sebagai agent, dilain pihak, karena dalam kontek ini, pertanggungjawaban bersifat kontraktual (Laughlin;1990) dalam Cahyono, Kholis, Satriawan (2002) sebaliknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony dan Young(1988;59), "dalam Cahyono, Kholis, Satriawan (2002) organisasi nirlaba tidak memperoleh modal ekuitas dari para investor luar, kecuali modal ekuitas mereka didominasi. Sebagai akibatnya, hubungan pertanggungjawaban antara organisasi dan individu-individu yang mendominasi harta benda mereka sangat kurang normal dan kurang struktur dibidang organisasi bisnis; ini bersifat komunal, meminjam istilah Laughlin (1990).

Seperti dalam kontek pengelolaan masjid, kita harus melihat secara seksama dan kritis hubungan-hubungan itu terutama dalam mendefinisikan "pemilik" keuangan masjid. Jika kita memiliki pandangan pengelolaan keuangan masjid, yang pada dasarnya memahami keuangan masjid sebagai amanah, kita dapat mempersepsikan bahwa orang-orang telah mempercayakan amanahnya adalah orang-orang yang banyak kepentingan, mereka adalah masyarakat anggota muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana pada masjid. Tentu saja harapan mereka pada umumnya tak tertulis dan implisit (termasuk) tidak terikat dengan pengambilan materi atas dana-dana mereka yang seperti umumnya terjadi organisasi-organisasi bisnis. Akan tetapi mereka memperhatikan bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan tersebut sebagaimana dengan tuntuna dalam akuntansi syariah.

Menurut Henke (1992:5) dalam Winarno (2001), organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki tujuan operasional untuk menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan secara sosial namun tidak dapat dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, keberadaan organisasi nirlaba utamanya untuk menyediakan beragam jasa untuk suatu masyarakat atau kelompok. Mereka merasa memerlukannya namun tidak dapat disediakan secara efektif oleh entitas laba.

Sedangkan menurut Belkaoui (1997:123) dalam buku *accounting theory* (terjemahan) dalam Lianto (2002) menyatakan tiga karakteristik yang membedakan organisasi nirlaba dengan laba dalam hal:

1. Pentingnya jumlah sumber yang diterima dari pemberi sumber (pemberi dana) yang tidak mengharapkan menerima imbalan atau pun faedah ekonomi lainnya yang sebanding dengan sumber (dana) yang diberikan.
2. Tujuan operasi terutama adalah selain menyediakan barang dan jasa dengan suatu keuntungan atau yang sederajat dengan keuntungan.
3. Tidak ada hak pemilik yang ditetapkan yang bisa dijual, dipindah tangankan, atau ditebus atau memberi hak atas suatu bagian dari suatu sisa pembagian sumber didalam hal terjadinya likuidasi perusahaan.

Ada pun perbedaan dari organisasi laba maupun nirlaba oleh Fees dkk.(1986:477) dalam buku *Accounting Princiles* terjemahan adalah sebagai mana sebagai berikut :

1. Motif keuntungan bukanlah dasar bagi operasinya atau berdirinya.

2. Biasanya dimiliki secara kolektif oleh para pemiliknya; yaitu hak pemilik biasanya tidak dibuktikan oleh saham yang dimiliki secara individual yang dapat dijual atau ditukarkan.
3. Bagi orang yang menyumbangkan sumber keuntungannya kepada organisasi tidak perlu menerima suatu bagian yang langsung atau yang proporsional atas barang atau jasanya.
4. Tujuan dari kebanyakan organisasi yang tidak berusaha mencari keuntungan adalah memberikan sebanyaknya barang dan jasa setiap tahun selama keuntungan dan sumber lain memungkinkan.
5. Organisasi yang berusaha tidak mencari keuntungan khusus operasi atas dasar tahun ke tahun dengan meningkatkan sumber selama mereka dapat dan membelanjakan sumber tersebut dalam rangka melayani mereka.
6. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang unik untuk memaksa menyumbang sumber keuangan secara tidak disengaja memulai perpajakan dari seluruh lapisan dengan percaya kepada kekuasaan tersebut. Pemerintah dapat berusaha memperbesar sumber yang dapat tersedia baginya setiap tahun namun dengan tujuan memungkinkannya memberikan pelayanan bukan memperbesar kekayaannya.

Adanya perbedaan karakter dan tujuan organisasi antara entitas nirlaba dengan laba juga memberikan ruang atas persamaan diantara keduanya, dalam hal (Freeman & Shuolders,1999:2) dalam Winarno (2001):

1. Mereka merupakan bagian integral dari sistem perekonomian yang sama dan memanfaatkan sumber yang serupa dalam rangka mencapai tujuan mereka.

2. Keduanya masing-masing harus memperoleh dan mengubah sumber yang langka menjadi barang atau jasa.
3. Proses pengelolaan keuntungan pada dasarnya serupa dan masing-masing harus mempunyai suatu sistem informasi yang dapat berjalan - sistem akuntansi merupakan suatu komponen yang integral darinya - untuk para manajer, badan pengatur, dan lainnya pada penerima data yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan pengevaluasian penggunaan sumber yang langka tersebut.
4. Karena sumbernya relatif langka - apakah itu dari sumbangan, diberi langganan, diperoleh dari investor atau kreditor, atau di peroleh melalui perpajakan - maka analisis biaya dan teknik evaluasi serta pengendalian lainnya adalah penting untuk memastikan bahwa sumber dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan secara efisien.
5. Beberapa kasus, keduanya menghasilkan produk yang serupa. Sebagai contoh: baik pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memiliki dan mengoperasikan sistem transportasi, pelayanan sanitasi, dan keperluan listrik atau gas.

Beragam karakteristik mengenai perbedaan dan persamaan antara entitas tidak normatif laba dengan bermotif laba di atas, juga terdapat ragam tipe organisasi nirlaba yang menurut Hanke(1992:6) dalam Lianto (2002) dikategorikan menjadi:

1. *Public nonprofit organizations*, yaitu organisasi yang dibentuk oleh langkah formal dari suatu komunitas dengan tujuan penyediaan berbagai jasa bagi

komunitas. (misal: pemerintah pusat: pemerintah provinsi dan pemerintah kota)

2. *Private nonprofit enterprise units*, adalah organisasi yang di bentuk oleh sekelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada jasa-jasa yang khusus (misal: pendidikan dan perawatan kesehatan)
3. *The nature or extent of support from their constituencies*, yaitu (1) organisasi yang diharapkan untuk bertahan sendiri setelah menerima suatu kontribusi modal awal misalnya; rumah sakit dan akedemi swasta. Dan.(2) organisasi yang membutuhkan dukungan operasional penuh secara tak terbatas misalnya; sebagian rumah sakit; badan kesejahteraan; gereja ; masjid dan lain-lain.

2.3. Karakteristik Masjid

Masjid sebagai bangunan umat Islam merupakan suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, khususnya untuk mengerjakan sholat. Istilah masjid berasal dari Arab sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah pada Allah SWT. Sejarah perkembangannya terikat erat dengan perluasan wilayah Islam dan pembangunan kota-kota baru saat itu. Pendirian bangunan masjid tidak dapat dilepaskan dari masalah sholat yang merupakan kewajiban umat Islam disamping sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan menyebarkan ajaran Islam, serta keterkaitannya yang sangat erat dengan tujuan, fungsi dan peranan yang melekat di setiap pembangunan masjid terhadap pembangunan umat Islam.

Tujuan pendirian masjid sebagaimana pertama kali didirikan oleh Rosullulah SAW saat hijra dari Makkah ke Madinah yaitu tempat desa Quba

dengan nama masjid Quba adalah hanya digunakan sebagai tempat untuk bersujud, tempat sholat, dan tempat berteduh dari panas terik matahari. Tujuan tersebut akhirnya berkembang tidak hanya sebagai tempat bersujud namun sebagai pusat aktivitas dan pusat kendali terhadap segala hal yang terkait dengan masalah umum Islam. Hal itu terjadi sejak didirikannya masjid kedua dalam sejarah yaitu masjid Nabawi oleh Rosullulah SWT yang berada ditengaaah kota Madinah.

Perkembangan tersebut akhirnya menjadikan sebagai fungsi yang melekat setiap pendirian masjid, sehingga masjid tidak hanya sekedar tempat sujud pada Allah SAW, tempat sholat, dan tempat ibadah pada-NYA, namun sebagai pusat kegiatan pusat pembinaan umat, dan pusat pengembangan budaya Islam serta pusat kesejahteraan umat. Pengetahuan dari ragam fungsi masjid tersebut melalui beragam aktivitas yang tentunya terbentuk kegiatan yang baik serta pantas dan wajar dilakukan sesuai dengan sifat dan kedudukan masjid sebagai rumah Allah SAW yang suci.

Peranan masjid dalam eksistensinya (Ayub dkk.19996:14) adalah masjid sebagai sumber dari pada aktivitas dimana tidak hanya menitik beratkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat namun juga duniawi. Masjid dalam arus informasi modern yaitu masjid sebagai tiang utama dalam mengaplikasikan risalah Islam dan masjid sebagai intitusi yang paling kompeten dalam menentukan tegak dan semaraknya agama Islam.

2.3.1. Organisasi dan Keuangan Masjid

Lianto (2002) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan atau pengoptimalan fungsi dan peranan masjid dalam meningkatkan kondisi umat Islam tidak bisa tidak memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai serta pengurusan yang amanah dan profesional. Pengelolaan masjid yang profesional dan amanah tentunya mengharuskan penataan atasnya dalam rangka organisasi dimana penghimpauan segala urusan terkait masjid dalam satu kesatuan dibawah kepemimpinan satu badan hukum pengurus yang mewakili semua unsur jamaah. Badan tersebut merencanakan sebagai program dalam rangka mencapai optimalisasi fungsi dan peranan masjid yang program tersebut terangkum dalam tiga bidang kerja, yaitu: bidang idarah, imarah, dan ri`ayah.

Perangkuman berbagai program kegiatan dalam tiga bidang kerja tersebut akan ter cermin dalam stuktur organisasi masjid dimana organisasi masjid akan terdiri atas berbagai pusat kegiatan atau departemen atau bidang. Adapun definisi tiga bidang kerja masjid tersebut berdasar pada pola pembinaan kegiatan kemasjidan - badan kesejahteraan masjid adalah:

1. *Idarah* adalah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerja sama dari banyak orang guna mencapai tujuan tertentu yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, perlengkapan, keuangan dan pengawasan.
2. *Imarah* adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jamaah. Usaha tersebut dapat meliputi: peribadaan, majlis taklim , remaja masjid,

perpustakaan, taman kanak-kanak, madrasa diniyah, pembinaan ibadah sosial, peringatan hari besar Islam dan nasional, pembinaan wanita, koperasi dan kesehatan serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan fungsi masjid.

3. *Ri`ayah* adalah aktivitas pemeliharaan masjid dari segi bangunan keindahan dan kebersihan. Pemeliharaan bangunan masjid terdiri atas bentuk bangunan/arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan, dan pemeliharaan kebersihan.

Dana atau pengelolaan keuangan masjid seperti pedoman pengelolaan keuangan masjid akan sangat erat hubungannya dengan; potensi sumber dana, pengeluaran dana, pembukuan/laporan keuangan dan pengawasan.

Potensi sumber dana. Penggalan dana melalui potensi yang ada dilingkungan dimana masjid berdiri, diantaranya melalui penggalan dana infaq, shodaqoh dan zakat maal atau melalui penerimaan rutin dari momen ritual sholat jum`at, tarawih, sholat Id dan pendapatan dari jasa yang diberikan pada jama`ah (misal: pendidikan kursus) serta dana lain (misal: wakaf) sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Hal lain juga dapat dilakukan oleh masjid adalah melakukan investasi baik yang bersifat langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif).

Tindakan investasi dapat dilakukan dengan dasar bahwa dalam konsep manajemen modern faktor kepastian sangat memegang peranan. Hal itu berarti bahwa masjid tentunya harus memiliki sumber keuangan yang tepat dan pasti yang menjamin kelancaran program kegiatan sesuai dengan rencana.

Pengeluaran dana. Dalam hal ini terikat dengan penggunaan dana sesuai dengan yang telah direncanakan. Perencanaan tersebut tentunya berkaitan dengan program kegiatan dalam rangka tiga bidang di atas, serta adanya suatu prosedur pertanggungjawaban keuangan, penggunaan dana dan syarat-syarat untuk menjamin pengelolaan dana dari penyalahgunaan.

Pembukuan/laporan keuangan. Suatu aktivitas akuntansi mulai dari pendokumentasian atas kegiatan terikat keuangan hingga pengkomunikasian pada jamaah yang sangat erat dengan sifat amanah dan profesional dari para pengurus masjid dalam mengelola dana yang di amanahkan. Oleh karena itu, akan timbul persepsi tentang pengurus masjid yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Pengawasan. Suatu fungsi yang tidak hanya diarahkan dalam pencapaian tujuan organisasi namun juga untuk mendukung tercapainya keyakinan yang mantap dari masyarakat atas pengelolaan kekayaan dan harta masjid serta pembinaan umat, sehingga masyarakat semakin tidak ragu-ragu dalam menyerahkan harta dan kekayaannya. Masjid dengan beragam unit kegiatan dapat memulai pengawasan atas pengelolaan keuangannya dengan cara selalu diawasi oleh masyarakat.

2.4. Kebutuhan Atas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Emerson (1992:7) Winarno (2001) menyatakan, laporan akuntansi menyediakan suatu gambaran akuntansi yang mewakili apa yang terjadi terhadap organisasi sebagai hasil dari berbagai aktivitas ekonominya.”

Suatu organisasi yang tidak berorientasi pada laba akan berdampak terhadap laporan keuangan (akuntansi) yang dibuat, dimana tidak menekankan

pada pencapaian laba (rugi), namun lebih pada menginformasikan mengenai sifat dan nilai atas sumber daya dan kewajiban organisasi serta cara bagaimana kedua hal tersebut berubah selama satu periode pelaporan dalam hal keefektifan dan keefisienan. Disamping itu, laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan organisasi nirlaba atas pengelolaan yang dilakukan terhadap sumber daya yang diperoleh kepihak-pihak yang berkepentingan *statement of financial accounting concepts* (SFAC No.4, per 40).

Sebagaimana pertanggungjawaban pengelolaan organisasi nirlaba, keberadaan laporan keuangan juga diperlukan dalam rangka (SFAC No.4, per 40):

1. Menginformasikan bentuk pelayanan yang diberikan organisasi.
2. Menilai keefektifan dan keefisienan dalam penyediaan jasa.
3. Kemampuan penyediaan jasa secara berkesinambungan.
4. Kemampuan perolehan arus kas secara tepat waktu dalam pemenuhan kewajiban organisasi.
5. Evaluasi pelaksanaan berbagai kewajiban terakit organisasi dan untuk mengubah atau merumuskan kebijakan baru atas organisasi.
6. Penilaian atas segala hal yang terikat dengan sumber daya organisasi yang dibatasi.
7. sarana melakukan pengendalian dan perencanaan berbagai aktivitas organisasi.

Serupa dengan masjid dalam hal ini pengelolaan masjid dengan berbagai aktivitas didalamnya disertai pula banyak pihak yang berkaitan dengan menjadikan suatu laporan khususnya pelaporan keuangan sangat dibutuhkan

keberadaannya. Laporan tersebut tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban pada pihak-pihak yang berkepentingan, namun juga merupakan alat pertanggungjawaban pengelola terhadap Allah SAW sebagai pihak utama seluruh yang ada dalam alam ini (Hertanto dkk,1999:69). Karena laporan keuangan disusun dan disajikan untuk memenuhi kepentingan sebagian besar pemakai, maka terdapat kemungkinan keterbatasan pada laporan keuangan, sehingga dalam pelaporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu untuk mengacu pada standar dalam hal ini mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

2.5. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Akuntansi Syari`ah.

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai jasa yang dibiarkan oleh organisasi dan kemampuannya untuk memberikan jasa tersebut, dan informasi mengenai cara manejer melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja manejer suatu organisasi nirlaba (Lianto, 2002).

Secara umum informasi-informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan akuntansi syari`ah, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban. Dan aktiva bersih suatu organisasi
2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar dalam satu periode dan hubungan antara keduanya

4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi

Pelaporan keuangan organisasi nirlaba bertujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi pengertian lebih mudah dipahami menurut kerangka dasar penyusuna dan penyajian laporan keuangan adalah bahwa "informasi dalam laporan keuangan dapat segera dipahami oleh pemakai dengan asumsi bahwa pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, dan hal ini tidak bisa dijadikan alasan oleh manajemen untuk tidak menyajikan informasi yang komplek".

2.5.1. Laporan Posisi Keuangan

Winarno (2001) menyatakan bahwa laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi yang terkandung didalamnya yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan pedoman eksternal.

Laporan posisi keuangan harus berfokus pada organisasi secara keseluruhan sehingga harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih.

Total aktiva bersih tersebut dilaporkan menurut ketiga kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.5.2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang merubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi yang terkandung didalamnya bersama pengungkapan informasi laporan keuangan lainnya dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa dan menilai tanggungjawab dan kinerja manajer (Winarno, 2001).

2.5.3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Informasi arus kas berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan dalam menghasilkan kas atau menilai kebutuhan organisasi dalam penggunaan kas tersebut.

Harahap (2001) "laporan arus kas merupakan ringkasan transaksi keuangan yang berhubungan dengan kas (*cash basis*) tanpa memperhatikan hubungannya dengan penghasilan atau biaya yang terjadi, dengan demikian laporan arus kas berbeda dengan laporan laba rugi yang penyusunannya menggunakan *accrual basis* .

2.5.4. Catatan Atas Laporan Kas

Harahap (2001) mengemukakan bahwa "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu dari laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan merupakan sarana akuntan untuk memperbesar atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan.

Laporan keuangan tidak memuat informasi yang rinci tentang beberapa pos atau akun, misalnya deposito yang ada pada setiap bank, karena informasi semacam itu justru akan membingungkan bukan memperjelas. Menurut Niswonger et.al. (1993:536) dalam Lianto (2002) "laporan keuangan harus memuat data yang dianggap sangat penting bagi pembacanya untuk memahami status keuangan organisasi".

2.6. Pengkomunikasian Laporan Keuangan

Organisasi sebagai entitas ekonomi yang baik berorientasi laba maupun nirlaba sebagaimana halnya manusia juga memiliki keharusan untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Locker dalam Winarno (2001) bahwa sedikit organisasi yang keberadaannya dimaksudkan untuk berkomunikasi. Salah satu wujud

komunikasi organisasi tersebut adalah mengkomunikasikan hal-hal dari aktivitas ekonomi organisasi mengenai konversi sumber daya menjadi barang dan jasa yang dapat di konsumsi (Emerson,1992:3) dalam Winarno (2001).

Kieso dan Weygandt (1995:5) dalam Winarno (2001) mengungkapkan mengenai tiga karakteristik utama akuntansi - intisari akuntansi sebagai aktivitas jasa, disiplin ilmu analitis dan sistem informasi yaitu: (1) identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi keuangan (2) kesatuan ekonomi (3) pihak yang berkepentingan. Komunikasi hasil-hasil aktivitas ekonomi umumnya diwujudkan dengan pengkuantifikasian dalam satuan uang yang selanjutnya disebut dengan informasi akuntansi. Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan salah satu wujud dari informasi akuntansi tersebut.

Dalam hubungannya dengan penyampaian informasi keuangan mengenai suatu organisasi, SFAC NO.1 menyatakan bahwa dalam mengkomunikasikan informasi keuangan tidak hanya sebatas pada informasi yang terdapat pada laporan keuangan (*financial statement*) namun juga informasi lain tentang organisasi yang perlu diungkapkan karena ada peraturan pemerintah, pengumuman pihak yang berwenang, kebiasaan atau karena pihak pengelola organisasi ingin menyampaikannya secara sukarela. Selanjutnya, penyampaian informasi selain yang terdapat dalam laporan keuangan disebut atau diistilahkan dengan pelaporan keuangan (*financial reporting*).

Menurut Rosjidi (1999:20) pelaporan keuangan (*financial reporting*) didefinisikan dengan mengkomunikasikan segala informasi tentang organisasi kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mencakup informasi pada laporan

keuangan (*financial statement*), informasi lainnya dan informasi non keuangan. Laporan keuangan, dalam organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan; laporan aktivitas; laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, informasi keuangan lainnya dapat berupa laporan tahunan dan prospektus organisasi, serta diskripsi pengelola tentang ekspektasi organisasi pada masa mendatang dan menjelaskan mengenai pengaruh organisasi pada lingkungan sosialnya yang keduanya termasuk contoh dari informasi non keuangan.

Segala informasi, sebagaimana dinyatakan di atas, memiliki keharusan untuk disampaikan ada pihak-pihak berkepentingan akan menekan adanya pengkomunikasian secara berkala atas informasi khususnya laporan keuangan kepada orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok internal (pengelola organisasi pada tingkat atas hingga bawah) dan eksternal (konstituen, penyumbang dan badan pemerintah maupun pengawas dan lain-lain.) merujuk pada Locker (1992:6) dalam Winarno (2001), komunikasi informasi tersebut dapat dilakukan secara verbal (*verbal communication*) dan non verbal (*non verbal communication*).

Komunikasi verbal merupakan komunikasi menggunakan kata-kata meliputi komunikasi secara tertulis (*written communication*) dan secara lisan (*oral communication*). Komunikasi tertulis dapat berupa penulisan dan penyusunan laporan keuangan serta dengan lisan melalui presentasi atas laporan dalam rapat internal maupun (*public expose*) dengan disertai diskusi.

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa penggunaan kata-kata, yang perwujudannya dapat dirupakan dengan pemuatan gambar atau

grafik dalam penulisan laporan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari laporan.

2.7. Rerangka Konseptual

Syari`ah adalah sesuatu yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, social dan filsafat moral. Dengan, kata lain, syari`ah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal akuntansi (Muhammad, 2002).

Seperti dalam akuntansi konvensional yang memfokuskan pada peran khusus akuntansi dalam hal: kegunaan pengambilan keputusan; informasi ekonomi; dan pelaporan keuangan secara benar, syari`ah mengenal semua peran tersebut, syari`ah juga akan memasukkan konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bidang akuntansi.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa syari`ah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai prinsip-prinsip akuntansi syari`ah, antara lain: prinsip pertanggungjawaban; prinsip keadilan; prinsip kebenaran. Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syari`ah tersebut, maka terdapat dua dimensi yang saling berhubungan, yaitu: (1) mencari keridhoan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan; (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat (Muhammad 2002).

Pemenuhan kedua bagian bentuk aktivitas tersebut adalah termasuk dalam ibadah. Dengan kata lain, akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim. Kedua dimensi itu saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan hak individu. Berdasarkan uraian

tersebut proposisi yang dapat akan memberi gambaran adalah P1. laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syari`ah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, maka secara visual rerangka konseptual akuntansi yang berdasarkan syari`ah digambarkan sebagai berikut:

